

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Jum'at 22 September 2023

RINGKASAN BERITA HARI INI

Komis A DPRD Sidoarjo Rekomendasi Warga dengan PT Bernorma Musyawarah Harga Tanah

041 Realitas Global News | 01 September 2023



SIDOARJO (global-news.co.id) – Pemahasan terkait lahan yang dijual ke PT Bernorma yang tidak kunjung usai, hari Rabu (20/9/2023) kembali dilaksanakan hearing (dengar pendapat) di ruang rapat DPRD Sidoarjo yang sempat tertunda beberapa kali.

Acara hearing dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan dan Partai Gerindra dan Ketua DPRD Sidoarjo H Uman yang sempat memantau sebetar dan Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamoni Chudori selaku ketua komisi, H Hario selaku Wakil Ketua komisi, Waih Andono, Choirul Hidayat, serta Muzayyin selaku anggota komisi.

Dari warga sebagai penjual tanah tidak dapat hadir dan diwakili ahli waris. Penjualan PT Bernorma, kecamatan Gedangan, dan Kepala Desa Tebel sejumlah OPD serta puluhan warga Danaratu hadir pada dalam agenda ini.

Sahaja Panjaitan selaku kuasa hukum PT Bernorma Pharmaceutical Company, mengaku kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Pihaknya sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. "Ini sebenarnya sudah memasuki ranah hukum. Karena dimasa yang dilakukan marka sendiri. Kita sudah pernah dipanggil oleh desa dan pemilik tanah juga pernah dipanggil kejaksaan," terangnya.

Namun karena ada undangan dari Komisi A DPRD Sidoarjo, pihaknya menginformasikan untuk hadir dan siap membicarakan bersama. "Memang kami mendapat undangan dari warga untuk membuat tanahnya sesuai tarung lebih 7.723 M2 dengan proposal yang masuk awal Januari 2022. Seniman pertama warga mima Rp 20 juta/M2 dan kemudian turun jadi Rp 15 juta/M2, namun kami manaver terakhir Rp 21 milyar atau sekitar 2,7 juta M2 untuk tanah saja belum bangunan," katanya.

Kalau warga mau lanjutkan penawaran lagi, kami siap duduk bersama untuk mencari harga yang cocok, tambahnya. "Yang jelas dalam perundingan nanti tidak ada tekanan atau paksaan, kalau tidak cocok harga yang betul, kita siap kalau memang mau jalur hukum," ujarnya.

Dimas Yehumura Af Faruq selaku kuasa hukum warga Danaratu menyampaikan kronologi masalah warga dengan PT Bernorma yang berlangsung sejak tahun 2022. "Itinya warga keged dengan adanya penentuan jalan umum oleh PT Bernorma yang semula pakai seng dan sekarang malah ditimbok, warga minta agar tembok dibongkar dan akses jalan bisa berfungsi seperti sebelumnya," tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Dimas juga menyoroti peran Bupati Sidoarjo dan jajaran di bawahnya yang tidak bisa melindungi dan memperjelas rakyat kecil dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

"Kita sudah pegang semua kesepakatan yang dilakukan oleh pihak desa, kecamatan dan pemilik tanah serta warga terkait akses jalan namun semua tidak jalan. Di Bupati Sidoarjo lok diom sngi," katanya.

Sementara itu, Lenggung salah satu perwakilan warga Danaratu menambahkan bahwa warga ingin PT Bernorma membeli tanahnya untuk perbaikan pabrik, tapi karena harga rendah, warga minta, "Kami ingin dibeli dengan harga yang manusiawi dan juga mempertimbangan aspek-aspek lain," katanya.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan mendukung Kades Tebel untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat desa. "Kades harus duduk di tengah dan tidak berbalah agar masalah ini cepat selesai," pintanya.

Menurutnya, masalah warga dengan Bernorma ini sudah berlangsung cukup lama, hampir satu tahun. "Kami berharap semua pihak bisa mengesampingkan ego masing-masing dan ngopi bareng mencari solusi yang baik, warga sangat diuntungkan dengan kehadiran pabrik karena bisa jadi karyawan atau menggerakkan ekonomi sekitar, sementara pabrik butuh warga untuk menjaga lingkungan sekitar, kula simbolis yang ideal," jelasnya.

Kayan menambahkan, jika pihak Kepala Desa Tebel tidak melihat kepentingan masyarakat, maka yang akan terkena imbas persoalan ini adalah pihak desa sendiri. "Saya ini 15 tahun pernah jadi kepala desa, jadi paham betul aturan batasan lahan untuk warga suburban. Kalau warga saya minta pihak Desa Tebel benar-benar bisa berfikir untuk mencari masalah warga ini," ujarnya.

Dikatakan sampai kapanpun, batas lahan yang berupa jalan dan saluran air ini, tidak bisa dikomersialkan oleh siapapun dan harus tetap ada. Jika ada masyarakat yang mengagut adanya penutupan saluran air maka sebenarnya pemerintah desa Tebel harus tahu bertindak seperti apa.

"Karena persoalan seperti ini jika Pemdesnya tidak bijaksana dan adil, maka saya yakin jika masuk ke ranah hukum, maka imbangnya pasti ke pemerintahan desa," ucapnya.

Kamudus, Ketua Komisi A Dhamoni Chudori menegaskan bahwa tugas dewan selaku wakil rakyat untuk memfasilitasi semua pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik. "Tari hasil hearing ini kita rekomendasikan agar warga dan PT Bernorma berunding dan bermusyawarah yang baik, tidak saling ngotot sehingga bisa menghasilkan titik temu," jelasnya.

Komis A DPRD Sidoarjo, Dhamoni Chudori merekomendasikan agar warga kelompok Danaratu serta Tebel dan PT Bernorma Pharmaceutical Company untuk duduk bersama dan musyawarah soal harga pelepasan tanah.

Hal tersebut merupakan kesimpulan akhir pada hearing pertemuan ini. "Kami juga menghimbau semua pihak terkait untuk meng-clearkan masalah ini," tegas Dhamoni.

Hal sama juga disampaikan anggota Komisi A Muzayyin yang juga warga desa Tebel bahwa konflik warga dan PT Bernorma seyogyanya bisa diselesaikan di desa tidak perlu ke lembaga lainnya. (win)

DPRD Sidoarjo Komitmen Jamin Hak Perempuan, Bahas Raperda Gender

17 September 2023 | Penanaman



PARIWARA SEPUTAR KEGIATAN DPRD SIDOARJO

DPRD Sidoarjo kembali menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender, Selasa (12/9/2023).

Memasuki agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo, sejumlah fraksi menilai bahwa Raperda pengarusutamaan gender ini sangat penting. Hal itu sebagai upaya parlemen dan wakil rakyat untuk menjamin hak-hak perempuan, disabilitas, dan masyarakat yang termarjinalkan.

Juru bicara Fraksi Nasdem Demokrat Hajjah Nurhidriyati Ningsih mengatakan, bahwa Raperda pengarusutamaan gender tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Sehingga kedudukan perempuan dengan laki-laki juga mendapat tempat yang sama.



Hajjah Nurhidriyati Ningsih, Ketua Fraksi Nasdem Kabupaten Sidoarjo, saat menyampaikan pendapat pada pembahasan Raperda pengarusutamaan gender.



Pembkamb Jalan Layang di Sepande Atasi Kemacetan

Jalan Layan Krian dan Tarik ditargetkan Selesai Akhir 2023

Salah satu upaya pengurangan kemacetan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan membangun jalan layang. Saat ini, pembangunan jalan layang di Sepande sedang berlangsung. Jalan layang ini akan menghubungkan Jalan Layan Krian dan Jalan Tarik. Dengan dibangunnya jalan layang ini, diharapkan kemacetan di area tersebut dapat berkurang. Pembangunan jalan layang ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Selama proses pembangunan, akan ada beberapa ruas jalan yang ditutup sementara. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo meminta masyarakat untuk memahami situasi dan menyesuaikan rute perjalanan mereka. "Kami berharap dengan dibangunnya jalan layang ini, kemacetan di area tersebut dapat berkurang dan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

DELA PUNYA

Dulu Blakang, Kini Sidomukti

SIDOARJO - Perkampungan Sidomukti, Kelurahan Sidokumpul, dulu memiliki nama yang berbeda dengan sekarang. Pada masa kejayaan sebagai kampung pecinan, wilayah tersebut bernama Blakang.

Konon, penamaan itu terkait dengan pusat Sidoarjo pada masa lampau. Dari peta Belanda 1892, tertulis wilayah sisi utara Sungai Sidokare bernama Blakang. "Artinya, bagian belakang," ujar pegiat sejarah Sidoarjo Masa Kuno dr Sudi Harjanto.

Sebutan Kampung Blakang, menurut Sudi, mungkin berkaitan dengan kompleks pertokoan pecinan yang dulu berada di sekitar Jalan Gajah Mada dan pesisir Sungai Sidokare. "Karena letaknya di belakang, orang menyebutnya Blakang," jelasnya.

Entah kapan nama Sidomukti sendiri ada. Tetapi, menurut Sudi, di peta Belanda 1922, nama Kampung Blakang sudah tidak ada lagi. Namun, banyak warga sekitar yang masih menyebut perkampungan Sidomukti tersebut dengan julukan Blakang.

Saat ini lokasinya juga padat penduduk di belakang ruko-ruko Jalan Gajah Mada. "Kalau sini masih orang tua bapak, mbah nyebutnya Blakang, kalau Sidomukti yang dekat sungai itu Bandaran," ungkap Setiyantoni, 40, warga sekitar. (eza/c7/any)



GANTI NAMA: Perkampungan Sidomukti di Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo, dulu bernama Blakang.

Dispendukcapil Permudah Masyarakat Rentan Bencana

SIDOARJO - Dalam upaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat rentan yaitu yang terkena dampak bencana (kebakaran, banjir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan inovasi baru untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo, Reddy Kusuma mengatakan inovasi ini merujuk pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang pendudukan yang rentan administrasi kependudukan. Dimana inovasi ini merupakan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan dan Desa serta stakeholder lainnya. "Sebenarnya inovasi ini sudah lama kita gagas, namun baru-baru ini karena inovasi terjadi bencana khususnya kebakaran maka kami terus bergerak untuk mempermudah masyarakat rentan dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk), mengingat dokumen adminduk ini adalah dokumen penting untuk pengurusan dokumen lainnya seperti sertifikat tanah, buku tabungan, bpjs," terangnya.

Reddy juga menambahkan, pengurusan adminduk ini meliputi pengisian formulir, mengentri data, dan menerbitkan dokumen seperti pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Pengurusan adminduk itu kemarin, kami lakukan di hari itu juga dengan cepat dan sigap semua selesai dalam 1 hari," ucapnya kepada duta.co Kamis (21/9/23).

Reddy berharap bahwa program ini mampu mengurangi beban administratif bagi warga yang sedang berjuang dalam mengatasi dampak bencana dan memberikan dukungan nyata serta memulihkan kehidupan warga dengan lebih cepat.

"Kami memahami bahwa masyarakat yang terkena bencana seringkali memiliki kebutuhan mendasar dan kompleksitas tambahan dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga diharapkan inovasi ini dapat membantu," tutupnya. • Lo



Layanan Dukapil bagi masyarakat yang rentan bencana

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A DPRD Sidoarjo Rekomendasi Warga dengan PT Bernofarma Musyawarah Harga Tanah

oleh Redakal Global News | 21 September 2023

BAGIKAN



SIDOARJO (global-news.co.id) – Permasalahan terkait lahan yang dijual ke PT Bernofarma yang tidak kunjung usai, hari Rabu (20/9/2023) kembali dilaksanakan hearing (dengar pendapat) di ruang rapat DPRD Sidoarjo yang sempat tertunda beberapa kali.

Acara hearing dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan dari Partai Gerindra dan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman yang sempat memantau sebentar dan Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori selaku ketua komisi, H Haris selaku Wakil Ketua komisi, Warih Andono, Choirul Hidayat, serta Muzayyin selaku anggota komisi.

Dari warga sebagai penjual tanah tidak dapat hadir dan diwakili ahli waris. Perwakilan PT Bernofarm, kecamatan Gedangan, dan Kepala Desa Tebel sejumlah OPD serta puluhan warga Danarestu hadir pula dalam agenda ini.

Sahala Panjaitan selaku kuasa hukum PT Bernofarm Pharmaceutical Company, mengaku kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Pihaknya sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. "Ini sebetulnya sudah memasuki ranah hukum. Karena dumas yang dilakukan mereka sendiri. Kita sudah pernah dipanggil dari desa dan pemilik tanah juga pernah dipanggil kejaksaan," terangnya.

Namun karena ada undangan dari komisi A DPRD Sidoarjo, pihaknya menghormati untuk hadir dan siap
Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
membahas bersama. "Memang kami mendapat tawaran dari warga untuk membeli tanahnya seluas kurang lebih 7.723 M2 dengan proposal yang masuk awal Januari 2023, tawaran pertama warga minta Rp 20

juta/M2 dan kemudian turun jadi Rp 15 juta/M2, namun kami menawar terakhir Rp 21 milyar atau sekitar 2,7 juta/M2 untuk tanah saja belum bangunan," katanya.

Kalau warga mau lanjutkan penawaran lagi, kami siap duduk bersama untuk mencari harga yang cocok, tambahnya. "Yang jelas dalam perundingan nanti tidak ada tekanan atau paksaan, kalau tidak cocok harga yang batal, kita siap kalau memang maju jalur hukum," ujarnya.



Dimas Yehamura Al-Farauq selaku kuasa hukum warga Danarestu menyampaikan kronologi masalah warga dengan PT Bernofarm yang berlangsung sejak tahun 2022. "Intinya warga kaget dengan adanya penutupan jalan umum oleh PT Bernofarm yang semula pakai seng dan sekarang malah ditembok, warga minta agar tembok dibongkar dan akses jalan bisa berfungsi seperti sebelumnya," tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Dimas juga menyoroti peran Bupati Sidoarjo dan jajaran di bawahnya yang tidak bisa melindungi dan memperjuangkan rakyat kecil dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

"Kita sudah pegang semua kesepakatan yang dilakukan oleh pihak desa, kecamatan dan pemilik tanah serta warga terkait akses jalan namun semua tidak jalan, ini Bupati Sidoarjo kok diam saja," katanya.

Sementara itu, Langgeng salah satu perwakilan warga Danarestu menambahkan bahwa warga ingin PT Bernofarm membeli tanahnya untuk perluasan pabrik, tapi karena dihargai rendah, warga menolak. "Kami ingin dibeli dengan harga yang manusiawi dan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain," katanya.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan mendorong Kades Tebel untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat desa. "Kades harus duduk di tengah dan tidak berat sebelah agar masalah ini cepat selesai," pintanya.

Menurutnya, masalah warga dengan Bernofarm ini sudah berlangsung cukup lama, hampir satu tahun. "Kami berharap semua pihak bisa mengesampingkan ego masing-masing dan ngopi bareng mencari solusi yang baik, warga sangat diuntungkan dengan kehadiran pabrik karena bisa jadi karyawan atau menggerakkan ekonomi sekitar, sementara pabrik butuh warga untuk menjaga lingkungan sekitar, itulah simbiosis yang ideal," jelasnya.

Kayan menambahkan, jika pihak Kepala Desa Tebel tidak melihat kepentingan masyarakat, maka yang akan terkena imbas persoalan ini adalah pihak desa sendiri. "Saya ini 16 tahun pernah jadi kepala desa, jadi faham betul aturan batas lahan alam yang berupa saluran air. Karenanya saya minta pihak Desa Tebel benar-benar bisa berlaku adil dalam menyikapi masalah warga ini," ujarnya.

Dikatakan sampai kapanpun, batas lahan yang berupa jalan dan saluran air ini, tidak bisa dikomersilkan oleh siapapun dan harus tetap ada. Jika ada masyarakat yang menggugat adanya penutupan saluran air, maka seharusnya pemerintah desa Tebel harus tahu bersikap seperti apa.

"Karena persoalan seperti ini jika Pemdes-nya tidak bijaksana dan adil, maka saya yakin jika masuk ke ranah hukum, maka imbasnya pasti ke pemerintahan desa," ucapnya.

Kemudian, Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori menegaskan bahwa tugas dewan selaku wakil rakyat untuk memfasilitasi semua pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik. "Dari hasil hearing ini kita rekomendasikan agar warga dan PT Bernofarm berunding dan bermusyawarah yang baik, tidak saling ngotot sehingga bisa menghasilkan titik temu," jelasnya.

Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori merekomendasikan agar warga kelompok Danarestu desa Tebel dan PT Bernofarm Pharmaceutical Company untuk duduk bersama dan musyawarah soal harga pelepasan tanah.

Hal tersebut merupakan kesimpulan akhir pada hearing pertemuan ini. "Kami juga menghadirkan semua pihak terkait untuk meng-clear-kan masalah ini," tegas Dhamroni.

Hal sama juga disampaikan anggota Komisi A Muzayyin yang juga warga desa Tebel bahwa konflik warga dan PT Bernofarm seyogyanya bisa diselesaikan di desa tidak perlu ke lembaga lainnya. (win)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Komitmen Jamin Hak Perempuan, Bahas Raperda Gender

by Redaksi Blok-A — 17 September 2023 in Pemerintahan



Foto: Pribadi DPRD Sidoarjo



Sidoarjo, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender, Selasa (12/9/2023).

Memasuki agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo, sejumlah fraksi menilai bahwa Raperda pengarusutamaan gender ini sangat penting. Hal itu sebagai upaya parlemen dan wakil rakyat untuk menjamin hak-hak perempuan, disabilitas, dan masyarakat yang termarjinalkan.

Juru bicara Fraksi Nasdem-Demokrat Hajjah Nurhendriyati Ningsih mengatakan, bahwa Raperda pengarusutamaan gender tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Sehingga kedudukan perempuan dengan laki-laki juga mendapat tempat yang sama.





H. Nurhendriyat Ningsih, Ketua Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo, saat menyampaikan pendapat pada pembahasan Raperda pengarusutamaan gender.

Menurutnya, tujuan dibahasnya Raperda pengarusutamaan gender ini agar hak perempuan sebagai warga negara terpenuhi dan mendapat jaminan di berbagai bidang. Baik hak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.



Kata dia, semua itu sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender.

"Untuk mewujudkan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Sidoarjo maka sangat dibutuhkan Perda tentang gender ini," tukas Nurhendriyat Ningsih.

Politisi dari partai NasDem ini juga menyebut bahwa melalui Raperda ini diharapkan perempuan dapat berperan serta dalam berbagai proses pembangunan. Baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apalagi, hal tersebut juga dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mana setiap warga negara maupun kelompok masyarakat mendapatkan perlindungan.

"Negara mengakui, memelihara, menjamin, menghormati dan memberikan perlindungan terhadap keberagaman bangsa Indonesia," tukasnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Haji Usman mengatakan betapa pentingnya menjamin hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar tidak termarginalkan.



Haji Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Baik dalam pembangunan dan dalam penataan perangkat daerah sekali pun.

Untuk itu, Raperda tersebut akan menjadi jembatan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat terlibat dalam menegakkan keadilan gender.

"Termasuk agar ikut andil dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa memandang gender," ujar Usman.

Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama.

Setiap warga negara juga memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan.

Aksesabilitas yang terbuka diimbangi dengan partisipasi yang baik akan menjadikan hal itu terwujud.

Adanya kontrol yang menguat justru juga akan menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan.

"Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai," sergahnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Indonesia Darurat Gender

Gayung bersambut upaya DPRD Kabupaten Sidoarjo, seiring upaya Indonesia telah meratifikasi konvensi

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1984.

Adanya Raperda keadilan gender di DPRD Sidoarjo ini diharapkan sejalan dengan UU nomor 7 tahun 1984 dan seiring itu terus dilakukan perbaikan.

Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan.

Sejarah Gender di Indonesia

Diskriminasi terhadap perempuan ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia

Pada 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan (Inpres PUG).

Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka pada 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender.

Dari aspek filosofis, Pancasila sebagai falsafah Negara merupakan landasan filosofis pentingnya UU KKG, terutama Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Sila Kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung makna bahwa keadilan belaku bagi setiap manusia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak

perempuan.

Tujuan 5 SDG tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu :

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan
- Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
- Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
- Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Visi dari ke-5 tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender yang tengah berjalan di Indonesia. ([jum/kdm/adv](#))

Tags: [dprd_sidoarjo](#) [gender_sidoarjo](#) [rapenda_sidoarjo](#)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KONI Jatim dan PB Porprov VIII Minta Doa Gus Ali Tulangan

SIDOARJO (BM) - Jajaran pengurus KONI Jatim dan PB Porprov VIII Jatim 2023 melakukan kunjungan ke Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, KH Agoes Ali Masyuri, Selasa (29/8/2023). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil ini untuk silaturahmi, meminta restu dan doa jelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII 2023 yang digelar 9-16 September dan dibuka di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil datang didampingi Ketua Panitia Besar (PB) Porprov) Ali Affandi, Sekretaris PB Porprov RB Zainal Arifin, Bendahara KONI Jatim Jasmono, Kabid Binpres Dudi Harjantoro, serta Kabid Pengadaan Aris Suhardono. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu, pengurus KONI bersama Gus Ali (sapaan akrab KH Agoes Ali Masyhuri) banyak membahas terkait persiapan Porprov VIII ini.

Gus Ali pun mengaku, sebagai

warga Tulangan juga beberapa kali melihat persiapan kontingen Kabupaten Sidoarjo. Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim itu menyambut gelaran Porprov VIII ini dan berharap memberi keberkahan tidak hanya prestasi tapi ekonomi masyarakat. "Insyaa Allah Porprov Jawa Timur sukses," ungkap Gus Ali.

Sementara itu, Ketua KONI Jatim M Nabil mengatakan, kehadiran rombongan ke Gus Ali tak lain adalah untuk memohon restu agar gelaran Porprov dapat berjalan lancar. "Kami mohon didoakan semoga lancar dan dapat mencapai tiga sukses yakni sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses ekonomi," ujar Nabil.

Ia menjelaskan, Porprov kali ini akan jauh lebih meriah karena diikuti oleh 17.283 orang dari 38 kabupaten/kota. Dengan rincian, 13.083 atlet dan 4.200 ofisial. "Dengan jumlah yang besar ini kami berharap Jatim makin banyak atlet-atlet prestasi ke depan. Dari sisi ekonomi, kami harap semua UMKM lokal dapat meraih keuntungan sebesar-

besarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan logo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII yang akan digelar 9-16 September 2023 tersebut.

Logo itu mulai diperkenalkan melalui Instagram @jatimpemrov pada Rabu kemarin.

Sebelumnya, Pemprov Jatim menyelenggarakan sayembara pembuatan logo Porprov Jatim VIII sebulan lamanya. Sayembara tersebut diikuti semua lapisan masyarakat.

Logo yang diikuti sayembara harus karya orisinil dan menggambarkan semangat serta optimisme olahraga di Jawa Timur. Peserta juga diharuskan memberikan filosofi desainnya.

Pemenang sayembara logo Porprov Jatim VIII adalah mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan bernama M Taufik Hidayat. Karyanya telah melalui tahap seleksi dan menyingkirkan 800 karya lainnya. (adv/har)



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

PORPROV VIII: Ketua KONI Jatim M Nabil bersama pengurus lainnya silaturahmi ke Gus Ali Tulangan Sidoarjo



MACET Kemacetan terjadi hampir setiap hari di sekitar jalan tol Desa Sepande, Kecamatan Candi. Kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan.

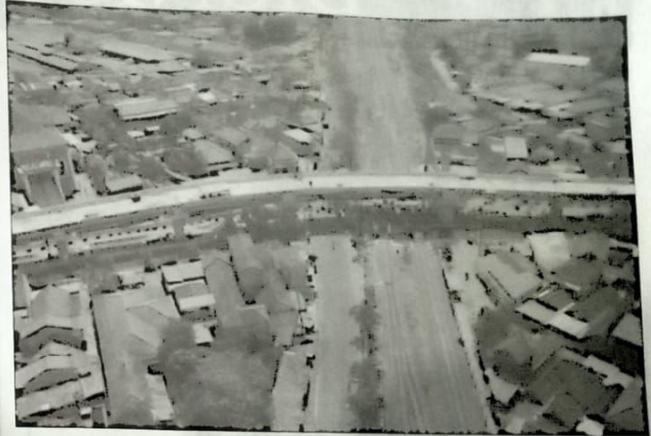


FOTO UDARA Jembatan layang Krian dilihat dari udara. Proyek jalan ini ditargetkan selesai akhir tahun 2023.

Pemkab Tambah Jalan Layang di Sepande Atasi Kemacetan

Jalan Layang Krian dan Tarik ditargetkan Selesai Akhir 2023

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menambah jalan layang tepatnya di atas jalan tol Desa Sepande, Kecamatan Candi, dari satu yang ada saat ini, guna mengurangi kemacetan akibat tingginya volume kendaraan.

"Untuk merealisasikan proyek ini, Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan PT Jasa Marga," kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Sidoarjo, Rabu (20/9).

Sebagai langkah awal, lanjutnya, dalam waktu dekat dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat tingkat urgensi pembangunan jalan layang tersebut. "Kami tinjau untuk melihat tingkat urgensinya. Selain jalan layang di Raya Sepande, kami nanti juga meninjau jalan layang Sidokeputung, jalan layang Sukolegok, dan jalan layang Sepande yang berada di sisi utara. Jika memungkinkan dibangun sekaligus," ucapnya.

Penambahan jalan layang ini dilakukan,

kata dia, mengingat tingginya volume kendaraan yang melewati Jalan Raya Sepande. Nantinya jalan layang yang sudah ada, sehingga akan ada dua jalur yang langsung dapat dilalui kendaraan roda empat. "Namun kami melihat mana yang lebih penting untuk dibangun, saat ini yang ramai dilewati kendaraan adalah Jalan Layang Raya Sepande," ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan kondisi Jalan Layang Raya Sepande saat ini tidak dapat dilewati berpapasan. Dengan lebar kurang dari lima meter, kendaraan roda empat yang lewat harus bergantian menunggu rambu lalu lintas yang mengaturnya. "Kami menjalin kerja sama dengan PT Jasa Marga untuk membangun Jalan Layang Raya Sepande sisi selatan," tuturnya.

Dwi mengatakan pembangunan dimulai

tahun 2024 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan oleh PT Jasa Marga. "Untuk besaran anggaran murni dari APBN, bukan dari APBD Sidoarjo," tuturnya.

Dwi juga menyebut langkah penambahan jalan layang dengan lebar 6-7 meter dari timur ke barat ini dapat mengurangi kemacetan. "Ini menjadi solusi agar kendaraan dari dua arah tidak perlu bergantian untuk lewat," tuturnya.

Sementara itu, proyek jalan layang di Krian dan Tarik ditargetkan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2023 guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Bupati Ahmad Muhdlor mengatakan, pembangunan jalan layang di Krian tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan akhir perlintasan kereta api serta perempatan di wilayah tersebut. "Saat ini progres pengerjaannya sudah mencapai 83 persen dan akhir tahun ini sudah bisa diselesaikan dan

manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Demikian juga dengan jalan layang di Tarik juga mencapai progres pembangunan sebesar 76 persen yang artinya sudah sesuai dengan jadwal waktu pengerjaan supaya akhir tahun ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Kondisi fisik kedua proyek jalan layang Krian dan Tarik ini telah mencapai progres yang memuaskan yaitu 83 persen untuk jalan layang Krian, sedangkan untuk jalan layang Tarik sudah mencapai 76 persen. Saat ini, jalan layang telah tersambung satu dengan lainnya, termasuk pengecoran di atas permukaan jembatan juga sudah dilakukan," ucapnya.

Pihaknya optimistis kedua proyek megah ini rampung akhir tahun, sehingga nanti Januari 2024 akan masuk uji kelayakan. "Saat ini pengerjaan tinggal pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan layang

serta pengerjaan akhir lainnya," ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan jalan layang Tarik dan Krian, Bachruni Aryawan mengatakan progres kedua proyek jalan layang ini masuk dalam tahap merampungkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPSO) tepat di sisi timur jalan layang serta penyelesaian akhir lainnya seperti pembangunan saluran air. "Kami terus kebut untuk target jalan layang bisa digunakan pada Januari 2024," ujarnya.

Bachruni juga meminta maaf kepada masyarakat jika ada beberapa pengalihan jalan untuk penyelesaian proyek jalan layang tepat waktu. "Kami mohon maaf jika masyarakat masih terganggu atas pengerjaan proyek ini, namun kami himbau agar melewati jalan alternatif untuk sementara waktu," ujarnya. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berita, Edukasi, Pemerintahan

Hearing Komisi A Terkait Konflik di Desa Tebel Yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo



Editor - Hearing Komisi A Terkait Konflik di Desa Tebel Yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo
September 21, 2024



Views: 18

Sidoarjo, MN Cakrawala- Saat hearing permasalahan antara warga Desa Tebel dengan PT Bernofarm di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan yang terjadi ternyata soal objek tanah saluran air yang diklaim warga merupakan sempadan dan aset desa, sementara pihak perusahaan yang sebutkan jalur tersebut telah dibeli perusahaan dari pemilik sebelumnya, tak kunjung ketemu titik terang nya, Rabu 20/9/24

"Sahai Panjaitan mengatakan ini kasus ini sebenarnya sudah memasuki ranah hukum. Karena dumas yang dilakukan mereka sendiri. Kita sudah pernah dipanggil dari desa dan pemilik tanah juga pernah dipanggil kejaksaan," terangnya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami dari DPRD Sidoarjo pastinya menghormati untuk hadir dan siap membahas bersama. "Memang kami

mendapat tawaran dari warga untuk membeli tanahnya seluas kurang lebih 7.723 M2 dengan proposal yang masuk awal Januari 2023,tawaran pertama warga minta Rp 20 juta/M2 dan kemudian turun jadi Rp 15 juta/M2,namun kami menawar terakhir Rp 21 milyar atau sekitar 2,7 juta/M2 untuk tanah saja belum bangunan,"katanya.

Komisi A DPRD Sidoarjo merekomendasikan agar warga kelompok Danarestu Desa Tebel dan PT Bernofarm Pharmaceutical Company untuk duduk bersama dan musyawarah soal harga pelepasan tanah.

Hal tersebut merupakan kesimpulan akhir pada hearing yang dilakukan,perwakilan PT Bernofarm,kecamatan Gedangan, dan Kepala Desa Tebel sejumlah DPD serta puluhan warga Danarestu hadir dalam agenda ini.

Dari Komisi A DPRD Sidoarjo dihadiri Dhamroni Chudori selaku ketua komisi,H Haris selaku Wakil Ketua komisi,Warih Andono,Chairul Hidayat,dan Muzayyin selaku anggota komisi.Sedang ikut hadir mengikuti hearing Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H.Kayan dari Partai Gerindra dan Ketua DPRD Sidoarjo H.Uzman yang sempat memantau sebentar.



Dimas Yehamura Al-Farouq selaku kuasa hukum warga Danarestu mengaku juga siap berunding dengan pihak PT Bernofarm soal harga pelepasan tanah."Kami menawarkan harga Rp 17 hingga 20 juta/M2 untuk tanah dan bangunan,"paparnya.

Sementara itu,Langgeng salah satu perwakilan warga Danarestu menambahkan bahwa warga Ingin PT Bernofarm membeli tanahnya untuk perluasan pabrik,tapi karena dihargai rendah,warga menolak."Kami ingin dibeli dengan harga yang manusiawi dan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain," katanya.

Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H.Kayan mendorong kades Tebel untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat desa."Kades harus duduk ditengah dan tidak berat sebelah agar masalah ini cepat selesai,"pintanya.

Menurutnya,masalah warga dengan Bernofarm ini sudah berlangsung cukup lama,hampir satu tahun."Kami berharap semua pihak bisa mengesampingkan ego masing-masing dan ngopi bareng mencari solusi yang baik,warga sangat diuntungkan dengan kehadiran pabrik karena bisa jadi karyawan atau menggerakkan ekonomi sekitar,sementara pabrik butuh warga untuk menjaga lingkungan sekitar,Itulah simbiosis yang ideal,"jelasnya.

Kayan menambahkan, jika pihak kepala Desa Tebel tidak melihat kepentingan masyarakat, maka yang akan terkena imbas persoalan ini adalah pihak desa sendiri. "Saya ini 16 tahun pernah jadi kepala desa, jadi faham betul aturan batas lahan alam yang berupa saluran air.

Karenanya saya minta pihak Desa Tebel benar-benar bisa berlaku adil dalam menyikapi masalah warga ini," ujar Kayan.



Kayan menambahkan, sampai kapanpun, batas lahan yang berupa jalan dan saluran air ini, tidak bisa dikomersilkan oleh siapapun dan harus tetap ada. Jika ada masyarakat yang menggugat adanya penutupan saluran air, maka sehanusnya pemerintah desa Tebel harus tahu bersikap seperti apa. "Karena persoalan seperti ini jika Pemdesnya tidak bijaksana dan adil, maka saya yakin jika masuk ke ranah hukum, maka imbasnya pasti ke pemerintahan desa," tutur Kayan. (Ubald)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LINTAS PELAYANAN

Korban Kebakaran di Sidoarjo Dapat Layanan Khusus Dispendukcapil

Sidoarjo, Bhirawa

Kasus kebakaran di Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi. Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, per 1 Januari - 31 Juli 2023, telah tercatat ada 158 kasus kejadian kebakaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, meluncurkan inovasi pelayanan khusus, untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan bagi warga Sidoarjo yang jadi korban kebakaran.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Drs Redy Kusuma MM, mengatakan pihaknya memberi layanan khusus kepada korban kebakaran, karena dokumen Adminduk adalah dokumen sangat penting untuk pengurusan sejumlah dokumen penting lainnya.

Seperti sertifikat tanah, buku tabungan, BPJS, untuk sekolah, untuk melamat pekerjaan dan lainnya. "Tidak segera punya dokumen Adminduk, saat ini masyarakat akan sulit mendapatkan layanan apapun, baik dari Pemerintah ataupun swasta," komentar Redy, Kamis (21/9) kemarin.

Ide inovasi khusus tersebut diluncurkan atas kolaborasi Dispendukcapil, BPBD Kabupaten Sidoarjo, kecamatan, Kelurahan, Pemerintahan desa dan stake holder lain. Inovasi tersebut sejalan dengan Permendagri nomor 96 tahun 2019, tentang penduduk yang rentan administrasi kependudukan.

Inovasi tersebut lanjut Redy, sebenarnya sudah lama digagas. Segera direalisasikan, karena saat ini banyak terjadi bencana khususnya kebakaran. "Inovasi ini semakin cepat kami direalisasikan, untuk mempermudah masyarakat yang rentan dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Sidoarjo," kata Redy. [kus.ca]





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Uji Kelayakan Produk

SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo menggelar acara uji kelayakan produk dan usaha dalam rangka pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema kewirausahaan. Acara yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 itu berlangsung meriah di ballroom sekolah, Kamis (21/9/2023).

Dalam acara yang penuh semangat itu, para siswa menampilkan berbagai produk kreatif mereka. Produk yang dipamerkan terdiri atas tiga kategori utama, yaitu produk art and craft, food and beverage, serta garment.

Kategori art and craft menampilkan produk-produk seperti puzzle, ganci, bros, magnet kulkas, totebag, dan string-bag handmade. Produk food and beverage menampilkan beragam makanan dan minuman lezat seperti keripik pisang nano-nano, cokelat ambyar, opak telo, donat, kopi cokelat, mi hutan belantara, dan es lumut. Sementara itu, produk kategori garment para siswa merencanakan bisnis produk seperti topi, kaus kaki, headband, ikat rambut, dan kaos jersey. Semua produk-produk itu dibeli dari pengusaha UMKM, kemudian mereka merancang logo, kemasan, dan membuat katalog untuk pemasaran produk mereka.

Proses uji kelayakan itu melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk para guru dan warga sekolah. Mereka dengan antusias melihat dan mendengarkan paparan dari siswa tentang perencanaan bisnis, strategi pengemasan, dan rencana harga jual barang.

Ketua pelaksana P5, Rochma Wahyu menjelaskan, uji kelayakan ini merupakan bagian dari tahapan Aksi atau Do dalam pembelajaran proyek P5. Dalam tahapan Aksi, siswa menampilkan sampel produk yang telah dihasilkan untuk diuji kelayakan oleh penguji dari Tim Manajemen.

"Selain itu, mereka juga melaksanakan



survei dengan membagikan angket kepuasan konsumen yang diisi oleh sesama siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk dan usaha yang mereka rencanakan memiliki kelayakan yang memadai," kata Rochma Wahyu.

Kepala SMP Al Falah Deltasari, Gatot Purwanto turut serta dalam acara itu dan memberikan apresiasi dengan mengunjungi semua

stand dan melakukan penilaian melalui pengisian angket kelayakan produk. Hal itu menunjukkan dukungan sekolah terhadap perkembangan kreativitas dan kewirausahaan siswa.

Setelah melewati uji kelayakan, para siswa akan mempersiapkan produk usaha mereka untuk dipasarkan. Pemasaran produk ini akan dilaksanakan pada tahap Share Day atau pameran karya, yang menjadi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka kepada masyarakat. Diharapkan pembelajaran P5 ini akan memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka dan membuka peluang bagi masa depan yang cerah.



M ANSHOR SJA'RONI

Guru di SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo
anshor.muhammad@gmail.com

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dari Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disdukcapil Permudah Masyarakat Rentan Bencana Urus Admindak

SIDOARJO - Dalam upaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat rentan yaitu yang terkena dampak bencana (kebakaran, banjir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan inovasi baru untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo, Reddy Kusuma mengatakan inovasi ini merujuk pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang penduduk yang rentan administrasi kependudukan. Dimana inovasi ini merupakan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan dan Desa serta stakeholder

lainnya.

"Sebenarnya inovasi ini sudah lama kita gagas, namun baru-baru ini karena banyak terjadi bencana khususnya kebakaran maka kami terus bergerak untuk mempermudah masyarakat rentan dalam pengurusan administrasi kependudukan (admindak), mengingat dokumen admindak ini adalah dokumen penting untuk pengurusan dokumen lainnya seperti sertifikat tanah, buku tabungan, bpjs," terangnya.

Reddy juga menambahkan, pengurusan admindak ini meliputi pengisian formulir, mengentri data, dan menerbitkan dokumen seperti pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu

Identitas Anak (KIA).

"Pengurusan admindak itu kemarin, kami lakukan di hari itu juga dengan cepat dan sigap semua selesai dalam 1 hari," ucapnya kepada duta.co Kamis (21/9/23)

Reddy berharap bahwa program ini mampu mengurangi beban administratif bagi warga yang sedang berjuang dalam mengatasi dampak bencana dan memberikan dukungan nyata serta memulihkan kehidupan warga dengan lebih cepat.

"Kami memahami bahwa masyarakat yang terkena bencana seringkali memiliki kebutuhan mendesak dan kompleksitas tambahan dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga diharapkan inovasi ini dapat membantu," tutupnya. • **Loe**



Layanan Dukcapil bagi masyarakat yang rentan bencana

DUTA

NEWS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Ikuti Hearing Persoalan PT Bernofarm, Kayan Minta Kades Tebel Utamakan Kepentingan Warganya

Sidoarjo, Pojok Kiri

M.Kayan SH Wakil Ketua DPRD Sidoarjo yang turut dalam hearing antara PT Bernofarm Pharmaceutical dengan warga Desa Tebel, dengan tegas meminta pihak pemerintahan Desa Tebel untuk bersikap adil kepada warganya dalam menuntaskan persoalan penutupan akses jalan di RW 01.

Menurut Kayan, jika pihak kepala Desa Tebel tidak melihat kepentingan masyarakat, maka yang akan terkena imbas persoalan ini adalah pihak desa sendiri.

"Saya ini 16 tahun pernah jadi kepala desa, jadi faham betul aturan batas lahan alam yang berupa saluran air. Karenanya saya minta pihak Desa Tebel benar-benar bisa berlaku adil dalam menyikapi masalah warga ini," ujar Kayan.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Kayan menumbuhkan sampai kapanpun batas lahan yang berupa saluran air ini, tidak bisa dikomer-

silkan oleh siapapun dan harus tetap ada.

Jika ada masyarakat yang menggugat adanya penutupan saluran air, maka seharusnya pemerintah desa Tebel harus tahu bersikap seperti apa. "Karena persoalan seperti ini jika Pemdesnya tidak bijaksana dan adil, maka saya yakin jika masuk ke ranah hukum, maka imbasnya pasti ke pemerintahan desa," tutur Kayan.

Seperti diketahui, upaya mediasi terus dilakukan komisi A DPRD Sidoarjo untuk menuntaskan keinginan warga RW 01 Desa Tebel Kecamatan Gedangan, yang menuntut dibuka lagi akses jalan yang kini ditutup tembok beton oleh PT Bernofarm Pharmaceutical. Pada mediasi yang digelar di ruang paripurna DPRD Sidoarjo itu, pihak-pihak yang berkepentingan terlihat berada di ruang paripurna.

Bagian hukum Pemkab Sidoarjo, Dinas PMD, Kepala Desa Tebel dan sekretaris Desa terlihat hadir

Dari pihak warga, puluhan ibu-ibu pemilik rumah yang berdiri disisi barat tembok pembatas lahan didampingi kuasa hukumnya hadir.

Dari pihak perusahaan, General Manager Eksternal Bernofarm, Kadim Bahri bersama sahala panjaitan selaku legal corporation dan beberapa staff PT Bernofarm juga datang. Pada mediasi yang dipimpin H.Damroni Chudlori ketua komisi A DPRD Sidoarjo bersama H.Haris Wakil ketua komisi A dan diikuti M.Kayan wakil ketua DPRD Sidoarjo ini, berbagai data dibuka oleh kedua belah pihak.

Dari pihak warga yang diwakili advokad Dimas Yemahura Alfaraw, menampilkan berbagai data kesepakatan yang sudah dibuat oleh PT Bernofarm dengan pihak desa, termasuk pemberian dana kompensasi sebesar Rp 700 juta. (Nang)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kadisdukcapil Sidoarjo, Drs Reddy Kusuma.

Dispendukcapil Sidoarjo Permudah Adminduk

Sidoarjo, Pojok Kiri

Dalam upaya memberikan dukungan kepada masyarakat rentan yaitu yang terkena dampak bencana (kebakaran, banjir) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan inovasi baru untuk memudahkan pengu-rusan administrasi kependudukan, Kamis, 21/9/23.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo, Drs. Reddy Kusuma mengatakan inovasi ini merujuk pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang penduduk yang rentan administrasi kependudukan. Dimana inovasi ini merupakan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan dan Desa serta stakeholder lainnya.

“Sebenarnya inovasi ini sudah lama kita gagas, namun baru-baru ini karena banyak terjadi bencana khususnya kebakaran maka kami terus bergerak untuk mempermudah masyarakat rentan dalam pengurusan

administrasi kependudukan (adminduk), mengingat dokumen adminduk ini adalah dokumen penting untuk pengurusan dokumen lainnya seperti sertifikat tanah, buku tabungan, bpjs,” jelasnya saat ditemui di Command Of Center Sidoarjo pada Selasa (19/9/2023).

Reddy juga menambahkan, pengurusan adminduk ini meliputi pengisian formulir, mengentri data, dan menerbitkan dokumen seperti pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA). “Pengurusan adminduk ini kami lakukan di hari itu juga dengan cepat dan sigap semua selesai dalam 1 hari,” ucapnya.

Reddy berharap bahwa program ini mampu mengurangi beban administratif bagi warga yang sedang berjuang dalam mengatasi dampak bencana dan memberikan dukungan nyata serta memulihkan kehidupan warga dengan lebih cepat. “Kami memahami bahwa masyarakat yang terkena bencana seringkali memiliki kebutuhan mendesak dan kompleksitas tambahan dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga diharapkan inovasi ini dapat membantu,” tutupnya. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DELT PUNYA ✓

Dulu Blakang, Kini Sidomukti

SIDOARJO - Perkampungan Sidomukti, Kelurahan Sidokumpul, dulu memiliki nama yang berbeda dengan sekarang. Pada masa kejayaan sebagai kampung pecinan, wilayah tersebut bernama Blakang.

Konon, penamaan itu terkait dengan pusat Sidoarjo pada masa lampau. Dari peta Belanda 1892, tertulis wilayah sisi utara Sungai Sidokare bernama Blakang. "Artinya, bagian belakang," ujar pegiat sejarah Sidoarjo Masa Kuno dr Sudi Harjanto.

Sebutan Kampung Blakang, menurut Sudi, mungkin berkaitan dengan kompleks pertokoan pecinan yang dulu berada di sekitar Jalan Gajah Mada dan pesisir Sungai Sidokare. "Karena letaknya di belakang, orang menyebutnya Blakang," jelasnya.

Entah kapan nama Sidomukti sendiri ada. Tetapi, menurut Sudi, di peta Belanda 1922, nama Kampung Blakang sudah tidak ada lagi. Namun, banyak warga sekitar yang masih

menyebut perkampungan Sidomukti tersebut dengan julukan Blakang

Saat ini lokasinya juga padat penduduk di belakang ruko-ruko Jalan Gajah Mada. "Kalau sini masih orang tua bapak, mbah nyebutnya Blakang, kalau Sidomukti yang dekat sungai itu Bandaran," ungkap Setiyantoni, 40, warga sekitar. (eza/c7/any)



AHMAD REZA/ JAWA POS

GANTI NAMA: Perkampungan Sidomukti di Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo, dulu bernama Blakang.

Cegah Stunting, Kampung Lali Gadget Ajak Anak-Anak Tangkap Ikan

WONOAYU-Kampung Lali Gadget yang berada di Dusun Bender, Desa Pagergumbuk, Kecamatan Wonoayu memiliki caranya sendiri untuk mengurangi angka stunting. Terlebih kenaikan angka stunting di Sidoarjo sempat menjadi sorotan berbagai pihak.

Manajer Operasional Kampung Lali Gadget, Achma Nizar Pratama mengungkapkan, kegiatannya banyak dikunjungi saat hari libur sekolah. Hanya terdapat puluhan pengunjung di hari biasa.

"Biasanya cuma puluhan saja, namun pas hari libur sekolah total bisa mencapai 257 anak yang main," ucapnya, Kamis (21/9).

Meski sudah cukup terkenal dengan permainan tradisionalnya, ia justru tertantang untuk turut serta menurunkan angka stunting di Sidoarjo. Apalagi kegiatannya bersentuhan langsung dengan anak-anak.

Ia mengarahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan tangkap ikan. "Awalnya ya jalan seperti biasa, tapi kami mendengar respon positif dari orang tua tentang kegiatan tangkap ikan," ujarnya.

Tidak hanya menangkap ikan, disana ia juga mengajak anak-anak bagaimana nantinya mengolah ikan hasil tangkapannya. Mulai dari memasak hingga siap disajikan di meja makan.



BIAR SEHAT: Para anak tampak ceria mengolah hasil ikan di Kampung Lali Gadget.

"Kami beri informasi pada anak tentang proses memasak hingga siap dihidangkan, lalu kami ajak untuk mempraktikkan," terangnya.

Kegiatan dimulai dengan menangkap ikan lele di air berlumpur. Ke-

mudian mempersiapkan bumbunya, membersihkan ikan lele, dan memasak.

"Untuk mengurangi stunting, usai bermain kami ajak anak bersama orang tua untuk menikmati hasil

usaha si anak hingga siap dimakan," ceritanya.

Dia yakin dengan kandungan protein tinggi dari ikan lele akan dapat membantu asupan protein pada anak. (sai/vga)

Cegah Stunting, Kampung Lali Gadget Ajak Anak-Anak Tangkap Ikan

WONOAYU-Kampung Lali Gadget yang berada di Dusun Bender, Desa Pagergumbuk, Kecamatan Wonoayu memiliki caranya sendiri untuk mengurangi angka stunting. Terlebih kenaikan angka stunting di Sidoarjo sempat menjadi sorotan berbagai pihak.

Manajer Operasional Kampung Lali Gadget, Achma Nizar Pratama mengungkapkan, kegiatannya banyak dikunjungi saat hari libur sekolah. Hanya terdapat puluhan pengunjung di hari biasa.

"Biasanya cuma puluhan saja, namun pas hari libur sekolah total bisa mencapai 257 anak yang main," ucapnya, Kamis (21/9).

Meski sudah cukup terkenal dengan permainan tradisionalnya, ia justru tertantang untuk turut serta menurunkan angka stunting di Sidoarjo. Apalagi kegiatannya bersentuhan langsung dengan anak-anak.

Ia mengarahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan tangkap ikan. "Awalnya ya jalan seperti biasa, tapi kami mendengar respon positif dari orang tua tentang kegiatan tangkap ikan," ujarnya.

Tidak hanya menangkap ikan, disana ia juga mengajak anak-anak bagaimana nantinya mengolah ikan hasil tangkapannya. Mulai dari memasak hingga siap disajikan di meja makan.



BIAR SEHAT: Para anak tampak ceria mengolah hasil ikan di Kampung Lali Gadget.

"Kami beri informasi pada anak tentang proses memasak hingga siap dihidangkan, lalu kami ajak untuk mempraktikkan," terangnya.

Kegiatan dimulai dengan menangkap ikan lele di air berlumpur. Ke-

mudian mempersiapkan bumbunya, membersihkan ikan lele, dan memasak.

"Untuk mengurangi stunting, usai bermain kami ajak anak bersama orang tua untuk menikmati hasil

usaha si anak hingga siap dimakan," ceritanya.

Dia yakin dengan kandungan protein tinggi dari ikan lele akan dapat membantu asupan protein pada anak. (sai/vga)